



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BURDAN BURNIAT**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **74695**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 930.000.000**

1. Tanah Seluas 399 m2 di KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI  
Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 9150 m2 di LEBONG, HASIL SENDIRI Rp.  
100.000.000
3. Tanah Seluas 1735 m2 di LEBONG, HASIL SENDIRI Rp.  
100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/86 m2 di KOTA  
LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 640 m2 di MUSI RAWAS, HASIL SENDIRI Rp.  
100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 737 m2/24 m2 di MUSI RAWAS,  
HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1740 m2/24 m2 di MUSI RAWAS,  
HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 503.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI  
Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI  
Rp. 300.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
190.000.000
4. MOTOR, HONDA NC 12A1CBF A7T Tahun 2012, HASIL SENDIRI



Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.950.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	128.158.600
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.613.108.600
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.613.108.600

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 September 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.